



**PERUBAHAN RENJA (P. RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja (Renja)) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

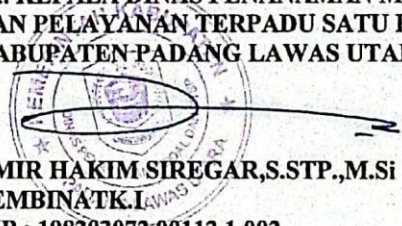
Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu untuk periode 1 (satu) tahun, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyusunan anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat.

Akhir kata, dokumen Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini semoga dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gunungtua, 28 Juli 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**AMIR HAKIM SIREGAR, S.STP., M.Si
PEMBINATK.I
NIP : 198203072-00112 1 002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)	
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	8
2.1. evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP sampai Triwulan II	9
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	27
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP	27
3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	28
3.3. Program dan Kegiatan.....	31
 BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD sampai Triwulan II Tahun Berjalan.....	9
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Bapelitbangda Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

2.1 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025, maka landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Otonomi Baru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organissi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b) Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DPMPTSP TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP
- 3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

BAB IV 3.3 Program dan Kegiatan
PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI TRIWULAN II

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sampai Triwulan II

Pelaksanaan Program/ kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam hal pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efesiensi, dan efektivitas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik analisis berikut

TABEL.2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara 2024 s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Peran gkat Daerah h Penan ggung Jawa b
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		1500.00%		16
		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN																							
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																							
1	Menin gkatk an Jumlah Tenaga Kerja Terampil	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-			0	17,322,000	1	21,973,900.00		11,552,000							1	21,942,000	1	39,264,000	100.00%	50.55%	

1.1	2.18.02.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan SOP			6	17,322,000	6	13,229,000.00		11,552,000	-	-	-	-	-	-	12	13,229,000	18	30,551,000	100.00%	50.55%	
1.1.1		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			1	9,966,000	1	5,710,000.00	-	2,839,000							1	5,710,000	2	15,676,000	100.00%	36.43%	
1.1.2		Rekomendasi Kebijakan Sektor yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah rekomendasi sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi perizinan berusaha berbasis risiko			5	7,356,000	5	7,519,000.00	1	2,839,000							5	7,519,000	10	14,875,000	100.00%	50.55%	

			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanama n Modal Kabupate n/Kota				0	1	8,7 44, 90 0.0 0	1	8,713, 000							1	8,7 13, 00 0	1	8,713, 000	#DI V/o!	#D IV/ o!	
			Penyusuna n Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanama n Modal Kab/Kota			0	0	1	8,7 44, 90 0.0 0	1	8,713, 000							1	8,7 13, 00 0	1	8,713, 000	#DI V/o!	#D IV/ o!	
Rata- Rata Capaian Kinerja																									
Predikat Kinerja																									
2	Menin gkatk an Jumla h Tenaga Kerja Teram pil	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAM AN MODA	-			0	26, 883 ,70 0	2	31, 59 3,4 00. 00		7,266, 000							-	31, 371 ,00 0	-	58,25 4,700	#DI V/o!	99 .3 0%	
2.1		2.18.03.1	Penyeleng garaan Promosi Penanama n Modal yang Menjadi Kewenang an Daerah Kabupaten/ Kota	-			2	26, 883 ,70 0	2	31, 59 3,4 00. 00	1	7,266, 000							2	31, 371 ,00 0	4	58,25 4,700	#DI V/o!	99 .3 0%	

2.1.1		2.18.03.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			1	6,103,200	1	31,593,400.00	7,266,000							-	31,371,000	1	37,474,200	0.00%	99.30%
2.1.2			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota			1	20,780,500		-	-	-						-	-	1	20,780,500	#DIV/0!	#DIV/0!
Rata- Rata Capaian Kinerja																							
Predikat Kinerja																							
3	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Terampil	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-			0	80,042,000	80	119,001,000	10	11,918,000							105,364,800	74	185,406,800	31.82%	94.09%
3.1		2.18.04.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	-			64	80,042,000	895	119,001,000	10	11,918,000		54,948,000				10	105,364,800	74	185,406,800	31.82%	94.09%

			yang Menjadi Kewenang an Daerah Kabupaten/ Kota																						
3.1.1			Pemantau n ,analisis,eval uasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat kan pemantau an analisis,eval uasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas derah kabupate n /kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha			50	22,5 75, 000	300	80 7,0 00. 00	20	795,0 00							2 0	79 5,0 00	70	23,37 0,00 0	6.67 %	98 .51 %	

3.1.2		2.18.04.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			1	1,07 1,000	5	2,151,000.00	2	2,123,000						2	2,123,000	3	3,194,000	40.00%	98.70%	
3.1.3			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			12	55,596,000	500	91,044,200.00	3	9,000,000	241	54,948,000				244	77,448,000	###	133,044,000	48.80%	85.07%	

3.1.4		2.18.04.1.5	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			1	800,000	10	24,998,800.00	-	-						10	24,998,800.00						
Rata- Rata Capaian Kinerja																									
Predikat Kinerja																									
4	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Terampil	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-			30	21,840,000	30	42,644,000	5	15,958,000						85	41,863,000	115	63,703,000	53.33%	97.98%		
4.1		2.18.05.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-			30	21,840,000	30	42,644,000	5	15,958,000	25,905,000					85	41,863,000	115	63,703,000	53.33%	97.98%		

			Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			0	150	38,686,000.00	40	12,000,000	40	25,905,000				80	37,905,000	80	37,905,000	53.33%	97.98%	
4.1.1			Pengawasan Penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisis dan diuverifikasi data ,[profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi			30	21,840,000	3,958,000.00	5	3,958,000						5	3,958,000	35	25,798,000	#DIV/0!	100.00%	

[illegible]

5.1.1		2.18.06.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			100	462,000	120	1,913,200.00	-	-						100	1,913,200	###	2,375,200	83.33%		
Rata- Rata Capaian Kinerja																								
Predikat Kinerja																								
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Dengan Indikator Pembangunan Yakni Indeks Kepuasan Masyarakat	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	-			0	723,789,199	110	788,090,100	20	145,394,184		148,445,828				54	#####	###	778,481,503	45.46%	1	

	Dan Perse ntase Pener apan E- Gover nment																								
1.1		3.25.01.2. 02.01.2	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentas e Terlaksan anya Administr asi Keuangan Perangkat Daerah			12	34, 920 ,00 0	12	37, 230 ,00 0	2	6,205, 000		12,4 10,0 00					9	27, 92 2,5 00	21	62,84 2,500	75.0 0%	75 .0 0%	
1.1.1			Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administr asi Pelaksana an Tugas ASN			12	34, 920 ,00 0	12	37, 230 ,00 0	2	6,205, 000	4	12,4 10,0 00					9	27, 92 2,5 00	21	62,84 2,500	75.0 0%	75 .0 0%	
1.2		3.25.01.2. 02.01.3	Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administr asi Umum Perangkat Daerah			42	265 ,88 5,6 59	42	28 8,11 4,1 00	7	54,46 3,600		23,2 70, 000					17	22 7,7 29, 64 0	59	493,6 15,29 9	52.8 6%	90 .19 %	
1.2.1			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediaka n			4	36, 270 ,00 0	4	22, 69 2,8 00. 00	2	12,786 ,000	1	7,13 8,0 00					4	22, 28 2,0 00	8	58,55 2,000	100. 00%	98 .19 %	

1.2.2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1	8,516,000	1	5,747,200.00		3,300,000		1,431,000				-	5,657,000	1	14,173,000	0.00%	98.43%	
1.2.3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4	15,900,000	4	12,416,000.00	1	1,802,000	2	4,789,000				3	12,349,000	7	28,249,000	75.00%	99.46%	
1.2.4			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			20	19,000,000	2	25,000.00				6,250,000				-	18,750,000	20	37,750,000	0.00%	75.00%	
1.2.5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2	16,131,342	2	6,691,400.00	1	4,292,000						2	6,620,000	4	22,751,342	100.00%	98.93%	
1.2.6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			10	164,631,317	10	201,055,000.00	2	30,297,600						7	149,451,600	17	314,082,917	70.00%	74.33%	

				Konsultasi SKPD																				
1.2.7		3.25.01.2.02.01.3.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	5,437,000	4	14,511,700	1	1,986,000		3,662,000				1	12,620,040	2	18,057,040	25.00%	86.96%	
1.3		3.25.01.2.02.01.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4	81,692,981	9	61,424,000.00	5	27,371,000		17,008,000				3	57,830,723	7	139,523,704	30.00%	96.53%	
1.3.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann			4	81,692,981	4	55,094,000.00	2	21,071,000		17,008,000					51,530,723	4	133,223,704	0.00%	93.53%	

				ya																						
1.3.2		3.25.01.2. 02.01.6.2	Pemeliharaan an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0	0	5	6,3 30, 00 0.0 0	3	6,300, 000						3	6,3 00, 00 0	3	6,30 0,00 0	60.0 0%	99 .5 3%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksan anya Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah			0	0	3	2,6 00, 00 0.0 0																
			Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n						2,6 00, 00 0.0 0																

1.5		3.25.01.2. 02.01.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksan nya kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota			36	329 ,09 9,3 59	36	39 0,1 88, 20 0.0 0	6	57,354 ,584		95,7 57,8 28				2 5	23 7,8 85, 98 6	61	82,50 0,00 0	69.4 4%	57 .9 3%	
1.5.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat			12	27, 500 ,00 0	12	25, 90 0,0 00. 00	2	5,900, 000	3	8,0 00, 000				7	15, 90 0,0 00	19	27,50 0,00 0	58.3 3%	61. 39 %	
1.5.2			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n			12	71,1 63, 059	12	133 ,68 0,0 00. 00	2	13,454 ,584	3	11,1 34,1 28				9	51, 313 ,33 6	21	27,50 0,00 0	75.0 0%	38 .3 9%	
1.5.3		3.25.01.2. 02.01.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n			12	230 ,43 6,3 00	12	230 ,60 8,2 00. 00	2	38,00 0,000	3	76, 623, 700				9	17 0,6 72, 65 0	21	27,50 0,00 0	75.0 0%	74 .01 %	

1.6		3.25.01.2. 02.01.1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun ya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja OPD			8	12,1 91,2 00	8	8,5 33, 80 0.0 0	-	-						-	5,6 08, 00 0	8	27,50 0,00 0	0.00 %	65 .7 2%	
1.6.1			penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah			2	1,82 0,0 00	2	4,5 34, 00 0.0 0	-	-						-	3,9 65, 00 0	2	27,50 0,00 0	0.00 %	87 .4 5%	
1.6.2		3.25.01.2. 02.01.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dari Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1,82 0,0 00	1	1,2 09, 40 0.0 0	-	-						1	1,2 01, 00 0	2	27,50 0,00 0	100. 00%	99 .31 %	
1.6.3			Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	2,9 22, 400	1	752 ,20 0.0 0	-	-						-	-	1	27,50 0,00 0	0.00 %	0. 00 %	

1.6.4		3.25.01.2. 02.01.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	1,962,000	1	379,400.00	-	-						1	371,000	2	27,500,000	100.00%	97.79%	
1.6.5		3.25.01.2. 02.01.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD			1	1,820,000	1	1,279,400.00	-	-						-	71,000	1	27,500,000	0.00%	5.55%	
1.6.6		3.25.01.2. 02.01.1.6	Koodinasi dan Penyuncapaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian			2	1,846,800	2	379,400.00	-	-						-	-	2	27,500,000	0.00%	0.00%	

[illegible]

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.2.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Jangka Menengah
DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ sasaran pada tahun ke		
3	4		2024	2025	2026
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan tata Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	63.77	68.77	73.77
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	89	91
		persentase Pertumbuhan Investasi Berskala Nasional PMA/PMDN	3%	3%	3%

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Didalam tujuan dan sasaran Nasional yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diselaraskan dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
			Meningkatnya derajatnya kesehatan		
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		
			Meningkatnya iklim demokrasi		
			Peningkatan ketangguhan bencana		
			Menurunnya angka kemiskinan		
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani		
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata		
3	Menurunnya kesenjanga antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
			Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman		
			Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan		
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
			Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah		
4	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
6	Terpenuhinya layanan dasar			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja Tahun 2024 yang lalu, identifikasi isu-isu penting urusan perindustrian, urusan perdagangan serta hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Utara. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dari program rutin dan program prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026.

Berikut adalah Tabel Program ,Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu





RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Perio de Rens tra OPD	Realis asi Capaia n RENJ A OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJ A OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daera h
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							3.176.821.996,00	3.500.714.080,00	2.590.444.791,00					5.835.048.739,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.176.821.996,00	3.500.714.080,00	2.590.444.791,00					5.835.048.739,00			
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3.176.821.996,00	3.500.714.080,00	2.590.444.791,00					5.835.048.739,00			
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				B Predikat	68,77 point	2.535.317.496,00	2.834.515.480,00	2.229.024.691,00						4.425.048.739,00		
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan ,Penganggar an dan Evaluasi Kinerja OPD	-			8 Dokumen	8 Doku men	3.571.000,00	8.533.800,00	8.533.800,00			Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angingan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi	ASN Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu		35.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Doku men	1.444.000,00	4.534.000,00	5.341.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angingan industri berbasis	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi			12.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN

																Kel/Desa		sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.						PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.01	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Doku men	609.400,00	1.209.400,00	2.823.400,00		Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				4.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.01	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Doku men	379.400,00	752.200,00	1.559.200,00		Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				4.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.01	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Doku men	379.400,00	379.400,00	2.225.600,00		Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				4.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U

																	negeri.						PINT U
	2	18	01	2.01	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Doku men	379.400,00	1.279.400,00	2.316.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi			4.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U	
	2	18	01	2.01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Lapora n	379.400,00	379.400,00	379.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi			7.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah n Kabupaten/ Kota	-			undefined undefined	90 persen	1.588.745.596, 00	1.623.134.180 ,00	1.623.134.180,0 0			Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi	ASN Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu		2.680.048.739, 00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

						Jumlah Orangyang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.439.705.596,00	1.474.094.180,00	1.405.229.991,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.070.048.739,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	149.040.000,00	149.040.000,00	37.230.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			610.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian OPD	-			2 Kegiatan	0 Kegiatan	26.250.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	22 Paket	26.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	

																								TERP ADU SAT U PINT U	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	0 Paket	0,00	26.250.000,00	0,00		Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				5.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.05	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00		Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				0,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	90 persen	438.744.200,00	419.319.100,0 0	419.319.100,00				Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tikan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi	ASN Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu			645.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener				1 Paket	1 Paket	10.255.700,00	10.255.700,00	15.764.700,00		Kab. Padang Lawas Utara, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb	Pelak sanaa n Refor masi				50.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN

							angan Bangunan Kantor yang Disediakan									Kecamat an, Semua Kel/Desa		angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Birok rasi					MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	38.142.600,00	38.144.900,00	43.285.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				80.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.582.000,00	9.582.000,00	10.016.700,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				60.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	01	2.06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17.430.000,00	17.430.000,00	17.446.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				60.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP

	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanan ya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	44.464.500,00	37.606.200,00	37.606.200,00			Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi	ASN Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu		350.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELAYAN AN TERP ADU SAT U PINT U	
	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi			100.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELAYAN AN TERP ADU SAT U PINT U	
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	4.538.500,00	4.538.500,00	5.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi			100.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELAYAN AN TERP ADU SAT U PINT U	
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	26.650.300,00	28.455.200,00	28.653.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi			100.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL	

															Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.						DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.275.700,00	4.612.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PENANGANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	-			90 %	90 %	331.788.200,00	391.878.200,00	391.878.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		560.000.000,00	DINAS PENANGANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	27.500.000,00	27.590.000,00	27.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PENANGANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

							Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.						DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	13 Unit	17.660.000,00	152.660.000,00	13.270.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	18.080.000,00	4.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBA NGAN IKLIM PENANAMA N MODAL	Realisasi total terhadap target investasi				-	3 persen	73.707.400,00	73.707.400,00	21.973.900,00							245.000.000,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			-	1 Dokumen	58.362.500,00	58.362.500,00	58.362.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PELAKU USAHA YANG MEMBUTUHKAN FASILITAS INTENSIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL		95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	36.663.500,00	36.663.500,00	5.710.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																	
							Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				5 Dokumen	150 Dokumen	21.699.000,00	21.699.000,00	7.519.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM yang disusun	-			1 Dokumen	1 Dokumen	15.344.900,00	15.344.900,00	15.344.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat yang berkepentingan terhadap dokumen RUPM		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.344.900,00	15.344.900,00	8.744.900,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi				-	3 persen	144.717.000,00	144.717.000,00	51.263.400,00							305.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Terlaksananya kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	-			-	2 Kali	144.717.000,00	144.717.000,00	144.717.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	MASYARAKAT DUNIA USAHA		305.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL

						Daerah Kabupaten/Ko ta	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	rasi					AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U	
	2	18	03	2.01	000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Doku men	101.548.000,00	101.548.000,0 0	19.670.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				300.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U	
	2	18	03	2.01	000 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Doku men	43.169.000,00	43.169.000,00	31.593.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				5.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U	
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANA N PENANAMA N MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan				70 PERSEN	90 PERS EN	321.250.900,00	345.945.000,0 0	199.957.900,00									360.000.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Inse ntif yang menjadi Kewenangan	-			5 Dokumen	1 Doku men	321.250.900,00	345.945.000,0 0	345.945.000,00			Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi	PELAK U USAH A			360.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN	

						Kabupaten/ Kota	Kabup											meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.					TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	04	2.01	000 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Inse ntif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota				5 Dokumen	1 Doku men	1.071.400,00	1.794.000,00	2.151.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				50.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	04	2.01	000 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatka n Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	196.971.700,00	246.055.600,0 0	131.149.900,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				100.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U
	2	18	04	2.01	000 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	95.938.400,00	95.938.400,00	65.850.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelak sanaa n Refor masi Birok rasi				70.000.000,00	DINA S PEN ANA MAN MOD AL DAN PELA YAN AN TERP ADU SAT U PINT U

	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																					
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					300 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	27.269.400,00	2.157.000,00	807.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU	
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha					1.334,9 Rupiah	30 persen	99.916.000,00	99.916.000,00	82.933.300,00									350.000.000,00		
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	-				40 Perusahaan	17 Perusahaan	99.916.000,00	99.916.000,00	99.916.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	MASYARAKAT PELAKUSAHA				350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU	
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																					
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan					150 Pelaku Usaha	168 Pelaku Usaha	69.900.000,00	69.900.000,00	78.975.300,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	

							Berusaha Berbasis Risiko											dalam negeri.						U PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku				30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	30.016.000,00	30.016.000,00	3.958.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha																	
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal				500 data	90 persen	1.913.200,00	1.913.200,00	5.291.600,00								150.000.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah database Perizinan dan Non perizinan pada website: www.sipatol.a.padanglawasutarakab.go.id	-			500 Data	300 Data	1.913.200,00	1.913.200,00	1.913.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	masyarakat yang berkepentingan terhadap database perizinan			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan				120 Dokumen	300 Dokumen	1.913.200,00	1.913.200,00	5.291.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

							Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan							Kel/Desa	sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		JUMLAH										3.176.821.996,00	3.500.714.080,00	2.590.444.791,00						5.835.048.739,00	

**BABA IV
PENUTUP**

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun, dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, jujur, dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradab.

Gunungtua, 28 Juli 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**AMIR HAKIM SIREGAR, S.STP., M.Si
PEMBINA TK.I
NIP : 198203072 00112 1 002**